

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN SELUMA NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK****Elisabet^{1(a)}**¹*Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH*^{a)}*manalue51@gmail.com***INFORMASI
ARTIKEL****Article History:**

Dikirim:

13-07-2025

Diterbitkan Online:

31-12-2025

Kata Kunci:Implementasi Kebijakan
Publik, Kabupaten Layak
Anak, Peraturan Bupati**Keywords:***Public Policy Implementation,
Child-Friendly Regency,
Regent's Regulation***Corresponding Author:***manalue51@gmail.com***DOI:**<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i4.1331>**ABSTRAK**

Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 48 Tahun 2017 tentang KLA dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis menggunakan model Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel utama. Hasil menunjukkan bahwa implementasi belum optimal karena lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan belum terpenuhinya seluruh indikator KLA. Namun, dukungan OPD dan peran Forum Anak menjadi faktor pendukung positif dalam pelaksanaan kebijakan ini.

ABSTRACT

Child-Friendly Districts (KLA) are a strategic effort by the local government to ensure the fulfillment and protection of children's rights on an ongoing basis. This study analyzes the implementation of Seluma Regent Regulation Number 48 of 2017 concerning KLA using a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The analysis uses the Van Meter and Van Horn model with six main variables. The results indicate that implementation is suboptimal due to weak coordination, limited resources, and the failure to meet all KLA indicators. However, support from regional government agencies (OPD) and the role of the Children's Forum are positive supporting factors in the implementation of this policy.

PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. (2019). Namun, kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang semakin parah. Berbagai upaya penanganan telah dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, namun koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala Lestyoningsih (2019). Survei nasional tahun 2018 oleh Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak menemukan bahwa 62% anak laki-laki dan perempuan pernah menjadi korban kekerasan di beberapa titik dalam hidup mereka. Menurut laporan tersebut, tiga dari lima anak perempuan dan setengah dari semua anak laki-laki mengalami kekerasan emosional, sementara satu dari sebelas anak perempuan dan satu dari tujuh belas laki-laki mengalami kekerasan seksual Lestyoningsih, I. H. (2019).

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan anak adalah dengan lebih mengoptimalkan fungsi Kabupaten dalam bentuk mengoptimalkan kebijakan Kabupaten

Layak Anak (KLA). Kabupaten layak anak (KLA) adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin hak dan perlindungan anak dimasa depan. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan menjamin terpenuhinya hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya secara terencana dan menyeluruh (Belakang, 1945).

Dalam upaya mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Seluma telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA). Di Kabupaten Seluma, tercatat 87 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2021–2024, terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran (DP3APPKB Provinsi Bengkulu). dalam pelaksanaannya, implementasi Perbup tersebut masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu permasalahan yang menonjol adalah masih terjadinya pelanggaran terhadap hak anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, hingga penelantaran anak. Kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa belum semua pihak memahami dan menjalankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam kebijakan yang berlaku. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana yang ramah anak juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Fasilitas umum seperti taman bermain, sekolah, puskesmas, dan ruang publik lainnya belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan dan keamanan bagi anak. Hal ini berpengaruh terhadap ruang gerak dan kualitas tumbuh kembang anak di wilayah tersebut.

Di sisi lain, implementasi kebijakan KLA juga masih dihadapkan pada belum terpenuhinya 24 indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Indikator-indikator tersebut mencakup lima klaster utama, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan khusus. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta lemahnya koordinasi antar sektor menjadi

faktor penghambat dalam pencapaian indikator-indikator tersebut.

Dalam penelitian ini mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai objek kajian serta untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam. Diantara nya penelitian dari (Pasya, 2024) yang melakukan penelitian di Kelurahan Pondok Kacang Barat, Tangerang Selatan menemukan bahwa program kebijakan KLA berjalan dengan dukungan pemerintah dan organisasi, namun terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat dan koordinasi antarlembaga. Sementara penelitian dari Puput (Harianti et al., 2020) dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan KLA di Kota Kendari meneliti 5 indikator (hak sipil, keluarga, kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus) dan dari hasil temuan nya menunjukkan 2 indikator berjalan baik, namun 3 lain nya belum optimal. Penelitian yang dilakukan (Lubis & Zubaidah, 2022) yang berjudul Implementasi KLA di Kota Pekanbaru menemukan bahwa koordinasi dan anggaran masih menjadi kendala utama, walaupun komitmen implementor cukup baik. Pada penelitian kali ini di khususnya untuk melihat implementasi kebijakan publik dengan analisis menggunakan model Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel utama.

Penelitian ini berfokus dengan implementasi kebijakan Bupati Seluma tentang penyelenggaraan Kabupaten layak Anak serta mengetahui sejauh mana peraturan ini diimplementasikan di Seluma dan mengukur dampak peraturan terhadap kesejahteraan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk memahami Implementasi Peraturan Kabupaten Seluma Nomor 48 Tahun 2017 tentang kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam melindungi hak-hak anak di Kabupaten Seluma. Kemudian untuk mengetahui dampak dari Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 48 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak terhadap kesejahteraan anak, terutama akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

METODE PENELITIAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, diperlukan pembentukan Peraturan tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Seluma. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan dan memahami Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak berdasarkan perspektif para pelaksana. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive*, *Purposive sampling* adalah teknik sampling non-probabilitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengidentifikasi dan memilih kasus-kasus yang kaya informasi terkait fenomena yang diteliti. Teknik ini melibatkan pemilihan individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan atau pengalaman khusus mengenai fenomena tersebut Nyimbili & Nyimbili(2024). Penjelasan ekspilit mengenai strategi pemilihan informan melalui *purposive sampling* dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas metodologi penelitian Campbell et al (2020). Untuk informan, penelitian ini menggunakan *Key Informan* yang lebih mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau permasalahan yang sedang diteliti. Selain menggunakan *Key Informan*, penelitian ini juga menambahkan beberapa informan tambahan agar informasi yang didapat diharapkan lebih detail dan mendalam. Informasi yang di peroleh itu bisa di dapat dari satu orang Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Seluma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meskipun terdapat komitmen dan semangat yang tinggi dari para pelaksana, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam enam variabel utama menurut teori Van Matter dan Van Horn yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Sudah cukup jelas, namun belum sepenuhnya dipahami dan diterjemahkan oleh seluruh instansi terkait dalam bentuk program yang terintegrasi;
2. Sumber Daya Keterbatasan sumber daya manusia, finansial dan waktu menjadi faktor penghambat utama. Banyak staf harus merangkap tugas dan belum tersedia anggaran khusus untuk program KLA;
3. Karakteristik Pelaksana Hubungan kerja antar pelaksana cukup baik dan terdapat norma kerja yang mendorong kolaborasi, namun struktur organisasi belum

mengakomodasi unit khusus yang menangani KLA secara penuh;

4. Komunikasi Antar Organisasi Koordinasi antar instansi sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya terstruktur dan rutin. Masih terdapat kesenjangan persepsi dan keterlibatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan eksternal masih menjadi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan keterbatasan ekonomi. Namun, terdapat dukungan sosial yang mulai berkembang melalui pembentukan forum anak desa.
6. Disposisi Pelaksana menunjukkan motivasi dan sikap positif terhadap kebijakan dilandasi oleh kepedulian dan rasa tanggung jawab moral terhadap anak.

Implementasi Kebijakan KLA Berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn

Dalam penelitian ini, untuk variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan diukur dengan dua indikator, yaitu indikator Kejelasan dan indikator Realistis. Variabel sumber daya terdiri dari tiga indikator antara lain, SDM, finansial, dan waktu. Variabel komunikasi antar organisasi diukur dari dua indikator yaitu instansi dan *stakeholder*. Variabel karakteristik pelaksana diukur dengan tiga indikator diantaranya struktur birokrasi, norma – norma dan hubungan dalam organisasi. kemudian variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik dilihat dari dua indikator yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan kondusif dan variabel terakhir yaitu disposisi atau sikap pelaksana, diukur dengan dua indikator yaitu indikator antusias dan komitmen.

Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2017 memiliki tujuan yang jelas dalam menjadikan Seluma sebagai Kabupaten Layak Anak. Tujuan ini diterjemahkan ke dalam upaya pemenuhan 24 indikator KLA yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pelaksana terhadap indikator-indikator tersebut belum merata. Beberapa pelaksana belum memahami indikator secara utuh, sehingga implementasinya tidak berjalan optimal. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3APKB menyatakan, “Kami tahu ada 24

indikator dari pusat, tapi untuk implementasinya belum semua bisa diterapkan karena keterbatasan kami di lapangan.” Meskipun demikian, terdapat komitmen dari Dinas P3APPKB untuk terus melakukan sosialisasi dan penguatan kapasitas pelaksana.

Variabel Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan KLA. Sumber daya manusia yang terbatas, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, menjadi tantangan signifikan. Selain itu, alokasi anggaran untuk program perlindungan anak masih dianggap minim, sehingga membatasi ruang gerak pelaksanaan kegiatan secara maksimal. Seorang staf DP3APPKB mengungkapkan, “Kami hanya beberapa orang di bidang ini, jadi tugasnya banyak. Kadang satu orang menangani dua atau tiga program sekaligus.” Selain itu, anggaran untuk kegiatan perlindungan anak tergolong minim, meskipun ada beberapa bantuan dari mitra seperti LSM. Di sisi lain, beberapa program berhasil dijalankan berkat dukungan dari lembaga mitra dan organisasi masyarakat, meskipun pelaksanaannya masih bersifat sporadis.

Variabel Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait masih belum optimal. Meskipun telah dibentuk Gugus Tugas KLA, komunikasi lintas sektor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaan program. Kepala UPTD DP3APPKB mengatakan, “Forum koordinasi memang ada, tapi tidak rutin. Kadang hanya jika ada program besar saja.” Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antarpelaksana belum berjalan konsisten, berdampak pada tidak sinkronnya pelaksanaan di lapangan. Namun demikian, kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi mulai digalakkan untuk memperbaiki komunikasi ini.

Variabel Karakteristik Pelaksana

Struktur organisasi Dinas P3APPKB di Kabupaten Seluma sebagai pelaksana utama sudah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, namun belum semua unit kerja memiliki pemahaman dan kapasitas yang setara. Struktur organisasi telah terbentuk, namun tidak semua pelaksana memiliki pelatihan khusus tentang isu anak. Salah satu staf menyampaikan, “Kami lebih banyak

belajar dari pengalaman, belum pernah ikut pelatihan khusus perlindungan anak.” Ini menunjukkan kurangnya kapasitas teknis yang seharusnya ditingkatkan untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Variabel Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial dan ekonomi di Kabupaten Seluma menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi implementasi kebijakan.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Seluma Tahun 2021-2024

Tahun	Bentuk Kekerasan			
	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran
2021	4	9	12	1
2022	2	0	19	0
2023	2	0	23	0
2024	7	0	6	2
Total	15	9	60	3

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Tingginya angka kemiskinan dan kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat menjadi tantangan signifikan. Menurut staf Kecamatan Talo, “Kadang masyarakat masih menganggap wajar kalau anak dikerasin, jadi sosialisasi ini memang harus berulang-ulang.” Budaya lokal dan rendahnya kesadaran terhadap hak anak masih menjadi hambatan struktural dalam pelaksanaan KLA.

Variabel Disposisi/Sikap Pelaksana

Pelaksana menunjukkan sikap positif, meskipun semangat mereka kerap terbentur dengan kendala teknis. Salah satu informan menyebutkan, “Kami semangat, tapi kalau tidak ada dana, ya kegiatan tidak bisa jalan.” Ini menunjukkan bahwa komitmen individu tidak cukup jika tidak didukung oleh sistem pendanaan dan perencanaan yang kuat.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian komparatif di beberapa negara dalam sistem kesehatan mental dengan menggunakan Model Van Meter & Van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan

implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, kapasitas organisasi pelaksana, komunikasi lintas lembaga, dan disposisi pelaksana Heather L. Bullock, John N. Lavis (2019). Temuan ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Seluma, di mana keterbatasan SDM dan anggaran, koordinasi yang belum terintegrasi, serta kapasitas institusi masih menjadi hambatan utama dalam implementasi Perbup 48/2017 tentang KLA. Tudi di Makassar oleh (Pratiwi et al., 2024), yang juga menggunakan kerangka Van Meter & Van Horn untuk menganalisis kebijakan Child-Friendly City di klaster kesehatan dan kesejahteraan anak, menemukan kendala berupa anggaran terbatas, SDM yang kurang berkualitas, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Temuan ini sejalan dengan kondisi di Kabupaten Seluma, di mana model Perbup 48/2017 masih terkendala oleh kekurangan sumber daya, komunikasi kelembagaan yang belum terintegrasi, serta kualitas pelaksana yang belum merata. (Wahyuni & Bachtiar, 2015) dalam studi mereka tentang implementasi kebijakan layanan sosial di Puskesmas Jakarta menggunakan Model Van Meter & Van Horn menemukan bahwa meskipun standar dan tujuan kebijakan sudah jelas, pemahaman pelaksana yang beragam dan komunikasi antar lembaga yang belum konsisten menjadi kendala signifikan. Temuan ini sangat sejalan dengan kondisi di Kabupaten Seluma, di mana meskipun arah kebijakan KLA kuat, pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya koordinasi lintas sektor, terbatasnya sumber daya manusia dan dana, serta pengaruh budaya lokal dalam lingkungan eksternal.

Penelitian (Dini Rizki, 2022) menunjukkan bahwa implementasi SPMI masih menemui kendala pada semua variabel model Van Meter & Van Horn – mulai dari pemahaman standar, distribusi sumber daya, hingga karakter pelaksana dan kondisi eksternal. Seperti di FISIP UIN Bandung, Kabupaten Seluma masih harus menangani masalah distribusi sumber daya, kapasitas pelaksana, dan integrasi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi KLA.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapatkan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Seluma Nomor 48 Tahun 2017 tentang

kebijakan Kabupaten Layak Anak belum berjalan secara optimal. Meskipun terdapat komitmen dan semangat tinggi dari para pelaksana, pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala dalam enam variabel utama menurut teori Van Matter dan Van Horn. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Sudah cukup jelas, namun belum sepenuhnya dipahami dan diterjemahkan oleh seluruh instansi terkait dalam bentuk program yang terintegrasi; Sumber Daya Keterbatasan sumber daya manusia, finansial dan waktu menjadi faktor penghambat utama. Banyak staf harus merangkap tugas dan belum tersedia anggaran khusus untuk program KLA; Karakteristik Pelaksana Hubungan kerja antar pelaksana cukup baik dan terdapat norma kerja yang mendorong kolaborasi, namun struktur organisasi belum mengakomodasi unit khusus yang menangani KLA secara penuh; Komunikasi Antar Organisasi Koordinasi antar instansi sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya terstruktur dan rutin. Masih terdapat kesenjangan persepsi dan keterlibatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD); Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan eksternal masih menjadi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak dan keterbatasan ekonomi. Namun, terdapat dukungan sosial yang mulai berkembang melalui pembentukan forum anak desa; dan Disposisi Pelaksana menunjukkan motivasi dan sikap positif terhadap kebijakan dilandasi oleh kepedulian dan rasa tanggung jawab moral terhadap anak.

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran atau masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperkuat komitmen kelembagaan dengan membentuk tim khusus KLA, menyediakan alokasi anggaran rutin melalui APBD, serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pembagian tugas yang jelas. Selain itu, perlu penguatan koordinasi lintas sektor melalui forum gugus tugas yang aktif dan terjadwal, serta pengarusutamaan kebijakan KLA dalam setiap dokumen perencanaan pembangunan di semua tingkat wilayah.
2. Masyarakat diharapkan aktif meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak melalui partisipasi dalam forum anak,

edukasi pengasuhan positif, dan pelaporan kasus kekerasan. Orang tua, tokoh masyarakat, agama, dan adat juga perlu berperan sebagai agen perubahan dalam menanamkan nilai-nilai perlindungan anak di lingkungan sekitar.

Kesehatan, 5(1), 1.
<https://doi.org/10.20527/jbk.v5i1.6063>

Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RİYASAH*, 12(2), 252.
<https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>

DAFTAR PUSTAKA

Belakang, A. L. (1945). *Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Jakarta: Refika Aditama, 2002), hlm. 15. 1 1. 1–21.*

Bullock, H. L., & Lavis, J. N. (2019). Understanding the supports needed for policy implementation: A comparative analysis of the placement of intermediaries across three mental health systems. *Health Research Policy and Systems*, 17(1), 1–13.
<https://doi.org/10.1186/s12961-019-0479-1>

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.
<https://doi.org/10.1177/1744987120927206>

Dini Rizki, F. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pada FISIP UIN Bandung. *The World of Public Administration Journal*, 3(2), 84–105.
<https://doi.org/10.37950/wpaj.v3i2.1227>

Erdianti, Ratri Novita, and Sholahuddin Al-Fatih. 2019. “Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia.

Harianti, P., Barlian, B., & Suaib, E. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Kendari. *Publica : Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(1), 147.
<https://doi.org/10.33772/publica.v11i1.13503>

Lestyoningsih, I. H. (2019). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Berbasis Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Berkala*

Nyimbili, F., & Nyimbili, L. (2024). Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies. *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, 5(1), 90–99.
<https://doi.org/10.37745/bjmas.2022.0419>

Pasya, S. (2024). *implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Studi Atas Program Layak Anak di Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan 2022.*

Pratiwi, D., Balqis, Darmawansyah, Palutturi, S., Wahyu, A., & Masni. (2024). Analysis of Implementation of City Policy for Children Basic Health and Child Welfare Cluster in Makassar City. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(9), e04724.
<https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n9-121>

Wahyuni, S. P., & Bachtiar, A. (2015). Analysis on Policy Implementation of Community Health Center as Report Obligation Recipient Institution for Narcotic Addicts in Jakarta Province in 2014. *Journal of Indonesian Health Policy and Administration*, 1(1).
<https://doi.org/10.7454/ihpa.v1i1.1001>